Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi **e-ISSN**: 2549-4236, **p-ISSN**: 1411-8939
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Vol 23, No 3 (2023): Oktober, 2870-2877
DOI: 10.33087/jiubj.v23i3.4603

Analisis *Stakeholder* dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi

Rinaldi, Asmadi Saad, Marwoto
Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Jambi
Correspondence: syah_adrin@yahoo.co.id

Abstrak. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan meliputi aspek; pencegahan, penanggulangan serta penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan. Semua *stakeholder* mempunyai peranan masing-masing pada setiap aspek dan diharapkan dapat berkontribusi dan bersinergi satu sama lain sehingga upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batang Hari dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Terdapat 31 (tiga puluh satu) *Stakeholder* yang terlibat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batang Hari, antara lain Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten Batang Hari, Masyarakat, Pelaku Usaha Perkebunan dan Kehutanan, Lembaga Sosial Masyarakat, dan Perguruan Tinggi. Dari 31 (tiga puluh satu) *Stakeholder* tersebut terdapat 14 (empat belas) *Stakeholder* yang masuk dalam kategori *Keyplayer*, terdapat 7 (tujuh) *Stakeholder* yang mempunyai peranan sebagai *Subject*, 3 (tiga) *Stakeholder* yang mempunyai peran sebagai *Context Setter* dan 7 (tujuh) *Stakeholder* yang berperan sebagai *Crowd*.

Kata kunci : pengendalian kebakaran hutan dan lahan, peranan, *Stakeholder*.

Abstract. *Land and forest fire management including aspect; prevention, countermeasures, and handling post forest and land fire. All stakeholders have respective roles in each aspect and expected can contribute and collaborate so that efforts to control fire forests and land in the Batang Hari District can be done effectively and efficiently. There are 31 (thirty-one) stakeholders involved in the land and forest fire management in the Batang Hari District, such as the Technical Implementation Unit of the Ministry of Environment and Forestry, Government of Jambi Province, Government district of Batang Hari, Communities, Plantation and Forestry Entrepreneurs, Social Community Institutions, and Universities. Out of 31 (thirty-one) stakeholders, there are 14 (fourteen) stakeholders enter the category Keyplayer, there are 7 (seven) stakeholders have a role as Subject, 3 (three) stakeholders have a role as Context Setter, and 7 (seven) stakeholders play a role as Crowd.*

Keywords*: stakeholders, roles, land and forest fire management*

PENDAHULUAN

Kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman potensial bagi upaya pembangunan berkelanjutan. Dari tahun ke tahun kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia semakin meningkat. Tercatat pada kebakaran hebat tahun 2015, 2,6 juta Ha lahan di Indonesia terbakar. Jumlah ini memang turun pada tahun 2016, karena bahan bakaran yang sudah menipis dan kondisi iklim yang tidak lagi anomali, namun kebakaran kembali meningkat pada tahun - tahun setelahnya, dimana puncaknya terjadi pada tahun 2019, dengan luas kebakaran lebih dari 1,6 juta Ha (Sipongi KLHK, 2020). Provinsi Jambi merupakan salah satu wilayah yang menyumbang kebakaran cukup besar. Berdasarkan data kebakaran hutan dan lahan dari tahun 2015 sampai tahun 2020, Provinsi Jambi menduduki peringkat 9 kebakaran terluas di Indonesia, dan berada pada peringkat 3 di wilayah Sumatera setelah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Riau yakni dengan luasan terbakar sebesar 183.197,5 Ha (Sipongi KLHK, 2020). Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi tidak hanya terjadi pada lahan gambut namun juga terjadi banyak di lahan mineral.

Kabupaten Batang hari termasuk salah satu kabupaten yang rawan kebakaran hutan dan lahan di provinsi Jambi. Kabupaten ini menepati urutan ke 4 sebagai kabupaten yang tinggi kejadian kebakaran hutan dan lahan dan menempati posisi pertama sebagai kabupaten yang memiliki ekosistem non gambut atau tanah mineral yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran tanah mineral menyebabkan matinya flora dan fauna, kerusakan habitat satwa, menurunnya jasa lingkungan, hilangnya bahan organik, matinya binatang tanah, timbulnya erosi dan perubahan iklim mikro (Wasis, 2006). Hilangnya kekayaan keanekaragaman hayati akibat kebakaran hutan dan lahan juga sangat menimbulkan kerugian, beberapa jenis flora dan

fauna yang di lindungi undang-undang banyak yang mati akibat kebakaran hutan dan lahan. Seperti contoh kasus, hilangnya beberapa jenis anggrek alami dan rusaknya habitat anggrek di desa Jambi Tulo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi serta rusaknya habitat pohon Bulian di Taman Hutan Raya Sultan Thaha Syaifudin di Kabupaten Batang Hari akibat kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 silam.

Kabupaten Batang hari merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jambi yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Kawasan lindung dan kawasan konservasi yang ada di kabupaten Batang Hari meliputi : Taman Nasional Bukit Duabelas, Cagar Alam Durian Luncuk II, Taman Hutan Raya Sultan Thaha Syaifudin, Taman Hutan Raya Bukit Sari, Restorasi Ekosistem Hutan Harapan dan beberapa kawasan lindung yang terdapat dalam konsesi hutan produksi dan perkebunan. Banyak hal bisa dilakukan untuk mengurangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Adinugroho *et al*. (2005) menyebutkan bahwa agar pengendalian kebakaran hutan dapat berhasil dengan baik maka sebelum dilaksanakan perlu disusun suatu rencana pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang menyeluruh, dengan melibatkan seluruh sumber daya yang ada. Rencana ini akan menjadi dasar dalam pelaksanaan pencegahan, pemadaman dan penggunaan api secara terkendali di dalam hutan dan di daerah sekitarnya. Untuk mengatasi kelemahan yang ada, maka penelitian ini diperlukan guna melihat *Stakeholder-Stakeholder* yang terlibat dan peranannya dalam pengendalian karhutla di Kabupaten Batang Hari.

METODE

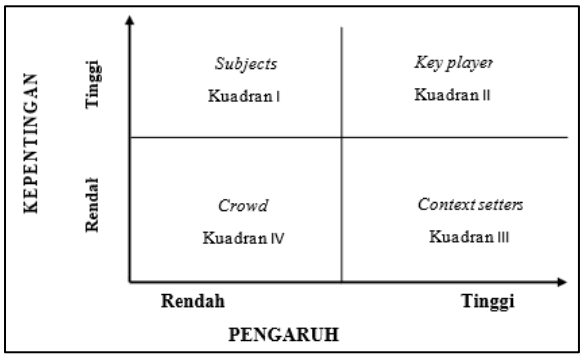
Penelitian menggunakan metode survey dengan unit analisis *Stakeholder* dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batang Hari. Ruang lingkup difokuskan kepada *Stakeholder* yang memiliki peranan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batang Hari. Adapun data yang akan diambil adalah sebagai berikut: (a) kepentingan dan pengaruh masing-masing *Stakeholder* dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batang Hari; dan (b) gambaran umum dan data lain yang mendukung penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, pada rentang waktu Agustus – November 2022. Pengolahan dan analisis data dilakukan di Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Jambi.

Dalam penelitian ini jenis data yang diperoleh dikelompokkan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan (observasi) dan hasil wawancara dengan *Stakeholder*. Metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu penentuan informan, wawancara, metode pengamatan langsung (observasi), dan studi Pustaka. Data yang diamati adalah: (1) Tingkat kepentingan dan pengaruh *Stakeholder* dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Batang Hari; (2) Bentuk-bentuk peranan *Stakeholder* terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Batang Hari;

Penetapan *skoring* menggunakan pertanyaan untuk mengukur tingkat kepentingan dan pengaruh *Stakeholder* adalah modifikasi dari model yang dikembangkan oleh Abbas (2005) yaitu pengukuran data berjenjang lima. Nilai skor dari lima pertanyaan dijumlahkan dan nilainya dipetakan ke dalam bentuk matriks kepentingan dan pengaruh. Data utama dan data penujang yang diperoleh akan dianalisis sesuai dengan karakteristik tujuan analisis data yaitu: analisis *stakeholder*. Analisis *stakeholder* digunakan untuk mengetahui peranan *Stakeholder* terhadap upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batang Hari dilakukan analisis *Stakeholder* dari aspek pengaruh dan kepentingannya. Menurut Reed *et al*. (2009) analisis *stakeholder* dilakukan dengan cara: 1) melakukan identifikasi *stakeholder*s dan kepentingannya; 2) mengelompokkan dan mengkategorikan *stakeholder*. Analisis *stakeholder* dilakukan dengan dengan penafsiran matriks kepentingan dan pengaruh *stakeholder* terhadap upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batang Hari dengan menggunakan *stakeholder grid* dengan bantuan *microsoft excel*.

Gambar 1 hasil *skoring* terhadap tingkat kepentingan dan pengaruh masing-masing *stakeholder*s dikelompokkan menurut jenis indikatornya dan kemudian disandingkan sehingga membentuk koordinat. Posisi kuadaran dapat menggambarkan ilustrasi posisi dan peranan yang dimainkan oleh masing-masing *stakeholder* terkait upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batang Hari yaitu: (1) *subjects* yaitu *stakeholder* yang

memiliki kepentingan yang tinggi tetapi pengaruhnya rendah dan walaupun mereka mendukung kegiatan, kapasistasnya terhadap dampak mungkin tidak ada. Namun mereka dapat menjadi pengaruh jika membentuk aliansi dengan *stakeholder* lainnya; (2) *key players* yaitu *stakeholder* yang aktif karena mereka mempunyai kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap pengembangan suatu proyek.; (3) *context setters* yaitu *stakeholder* yang memiliki pengaruh yang tinggi tetapi sedikit kepentingan. Oleh karena itu, mereka dapat menjadi resiko yang signifikan untuk harus dipantau. Dan (4) *crowd* merupakan *stakeholder* yang memiliki sedikit kepentingan dan pengaruh terhadap hasil yang diinginkan dan hal ini menjadi pertimbangan untuk mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan. Pengaruh dan kepentingan akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sehingga perlu menjadi bahan pertimbangan.



Sumber: (Reed *et al*, 2009)

Gambar 1
Matriks Pengaruh dan Kepentingan Hasil Analisis Stakeholder

HASIL

Pelaksana kebijakan Dalkarhutla pada pemerintah pusat yang berfungsi operasional di daerah, dalam penelitian ini yang berada di Kab. Batang Hari dan berada pada tingkatan Daerah Operasi (Daops) dilaksanakan oleh Brigade Pengendalian Kabakaran Hutan dan Lahan (Brigdalkarhutla) Manggala Agni Daops Sumatera X/ Muara Bulian. Wilayah kerja Daops Manggala Agni ditetapkan dengan mempertimbangkan jangkauan pelayanan Dalkarhutla. Wilayah kerja Manggala Agni Daops Sumatera X/ Muara Bulian sendiri memiliki wilayah kerja yang mencakup dua Kabupaten yaitu Kab. Batang Hari (8 Kecamatan) dan Kab. Tebo (2 Kecamatan). Daops Sumatera X/ Muara Bulian sebagai pelaksana operasional Dalkarhutla, dipimpin oleh Kepala Daops, di bawah pembina teknis Manggala Agni Regional dan bertanggung jawab kepada Manggala Agni Pusat.

Pada pelaksanaan operasional untuk mendukung pekerjaan di lapangan, Daops Sumatera X/ Muara Bulian mempunyai anggota regu yang bertugas dilapangan untuk menjalankan implementasi Dalkarhutla yang meliputi pencegahan, penanggulangan, dan penanganan pasca Karhutla yang dipimpin oleh kepala regu dan bertanggungjawab kepada Kepala Daops Manggala Agni. Daops Sumatera X/ Muara Bulian dibentuk pada tahun 2002, yang terdiri dari 2 (dua) regu pemadam. Sementara pelaksana kebijakan Dalkarhutla pada tingkat kabupaten yang berada di Kab. Batang Hari terdiri dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kecamatan, desa, kepolisian, TNI, perusahaan, serta instansi terkait yang memiliki fungsi dan tanggung jawab masing-masing pelaksana tersebut untuk kemudian bertanggung jawab terhadap kepala daerah dalam hal ini bupati sebagai pimpinan tertinggi yang ada di kabupaten.

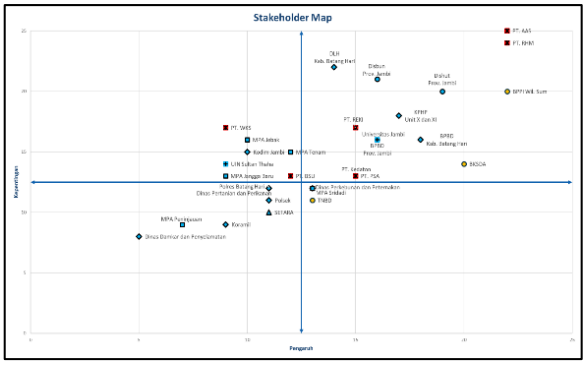
Keterlibatan banyak pihak yang menangani permasalahan Karhutla di Kab. Batang Hari akan menimbulkan keuntungan dan kemudahan dalam pelaksanaan kebijakan yang telah dikeluarkan. Apabila di koordinasikan dengan baik maka kemungkinan pelaksanaan peraturan mengenai Dalkarhutla ini akan berjalan dengan efisien dan tepat sasaran, namun sebaliknya apabila masing-masing pihak yang terlibat tidak mempunyai sebuah konsep koordinasi dan komunikasi yang jelas maka akan timbul banyak tumpang tindih dan pengulangan kegiatan di tempat yang sama sedangkan di tempat lain yang mengalami kejadian Karhutla juga perlu segera dilakukan penanganan. Kondisi seperti ini yang harapannya akan di minimalisir sehingga semua sumber daya dalam Dalkarhutla di Kab. Batang Hari yang ada dapat di lakukan dengan tepat dan terkoordinir dengan baik.

Dalam penelitian ini dilakukan analisis *Stakeholder* dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kab. Batang Hari, menurut Groenendijk, langkah-langkah yang dilakukan antara lain :

1. Melakukan identifikasi *Stakeholder*; hasil identifikasi *Stakeholder* dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kab. Batang Hari, ada 31 (tiga puluh satu) *Stakeholder* antara lain :

a. Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meliputi : Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Sumatera Daops Manggala Agni Sumatera X/ Muara Bulian, Balai Taman Nasional Bukit Dua Belas Seksi Pengelolaan TN Wilayah I Batang Hari, Balai KSDA Jambi Seksi Konservasi Wilayah II Batang Hari.
b. OPD Pemerintah Provinsi Jambi antara lain : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov Jambi, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Perkebunan Prov Jambi.
c. OPD dan UPT Pemerintah di Kabupaten Batang Hari Meliputi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari, Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi Unit X dan XI , Dinas Lingkungan Hidup Kab. Batang Hari , Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Batang Hari, Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Batang Hari, Dinas Damkar dan Penyelamatan Kab. Batang Hari, Polres Batang Hari, Kodim Jambi, Polsek Muara Tembesi dan Koramil Muara Bulian.
d. Perguruan Tinggi antara lain : Universitas Jambi, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifudin.
e. Lembaga Sosial Masyarakat : Yayasan Setara.
f. Masyarakat Peduli Api desa Jangga Baru, Sridadi, Jebak, Tenam, Peninjauan.
g. Perusahaan Perkebunan dan Kehutanan ; PT. Restorasi Ekosistem Indonesia, PT. Wira Karya Sakti, PT, Rimba Hutani Mas, PT. Agro Alam Sejahtera, PT. Berkah Sawit Utama, PT. Kedathon, PT. Palma Sukses Abadi.

2. Mengelompokkan dan membedakan peran antar *Stakeholder*; metode analisis yang digunakan yaitu menggunakan matriks pengaruh dan kepentingan dengan mengklasifikasikan *Stakeholder* ke dalam *Key players*, *context setters*, *subjects*, dan *crowd*. Pengaruh (*influence*) merujuk pada kekuatan (*power*) yang dimiliki *Stakeholder* untuk mengontrol proses dan hasil dari suatu keputusan. Kepentingan (*importance*) merujuk pada kebutuhan *Stakeholder* di dalam pencapaian output dan tujuan (Reed *et al*., 2009).



Sumber: data olahan

Gambar 2
Peta Analisis Stakeholder.

Berdasarkan hasil analisis *Stakeholder* menggunakan *Stakeholder grid* didapatkan hasil sebagai berikut:

Key player

Key player merupakan *Stakeholder* yang aktif karena mereka mempunyai kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kab. Batang Hari. *Stakeholder* yang termasuk dalam kategori ini antara lain : Balai PPI Sumatera, Balai KSDA Jambi, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Batang Hari, BPBD Kab. Batang Hari, KPHP Unit X dan XI, PT. Restorasi Ekosistem Indonesia, PT. Agronusa Alam Sejahtera dan PT. Rimba Hutani Mas. Pada kategori *Key player* ini Sebagian besar *Stakeholder* yang masuk kategori ini adalah *Stakeholder* yang memiliki kemampuan Sarana dan Parasarana serta Sumber Daya Pemadam yang mencukupi, seperti Balai PPI Wilayah Sumatera (Manggala Agni), PT. REKI, PT. AAS, PT RHM, dan *Stakeholder* yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) langsung dan berkaitan dengan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan memiliki wilayah kerja yang juga rawan kejadian kebakaran hutan dan lahan seperti : BKSDA Jambi, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD Kab. Batang Hari.

Balai PPI Wilayah Sumatera Merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkunga Hidup dan Kehutanan di bawah Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim memiliki Tupoksi melaksanakan peningkatan kapasitas daerah dalam mitigasi perubahan iklim, pengendalian bahan perusak ozon, dan adaptasi perubahan iklim; fasilitasi inventarisasi gas rumah kaca, dan pemantauan, pelaporan,

validasi data aksi dan sumber daya perubahan iklim yang teregistri; dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Untuk level tapak, terdapat Daops Manggala Agni yang bertugas melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Di Kabupaten Batang Hari diampu oleh Manggala Agni Daops Sumatera X/ Muara Bulian yang memiliki wilayah kerja Kabupaten Batang Hari serta Kec. Muara Tabir dan Tebo Ilir di Kab. Tebo. Manggala Agni melakukan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan meliputi: Pencegahan (Patroli, Deteksi dan Peringatan dini, Penyadartahuan kepada masyarakat serta peningkatan sumberdaya Manusia bidang Karhutla) Penanggulangan (Pemadaman Darat, *Moping Up*) Pasca Kebakaran serta Dukungan Evakuasi dan Dukungan Manajemen.

Dinas Kehutanan dan BKSDA Jambi memiliki peranan dan kepentingan yang tinggi dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. BKSDA Jambi yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Mempunyai tugas pokok dan fungsi melestarikan keanekaragaman hayati baik didalam maupun diluar kawasan konservasi. Salah satu kawasan konservasi yang menjadi tanggung jawab BKSDA Jambi adalah Cagar Alam Durian Luncuk II di Kec. Bathin XXIV. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi memiliki tanggung jawab pada kawasan Tahura Bukit Sari di Kecamatan Maro Sebo Ulu.

Pada *Stakeholder* dari dunia perusahaan kehutanan cenderung lebih mempunyai peranan dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan. PT. Restorasi Ekosistem Indonesia, PT, Agronusa Alam Sejahtera dan PT. Rimba Hutani Mas memiliki peranan yang tinggi dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, baik pada wilayah konsesinya maupun radius 5 (lima) Kilometer di luar batas wilayah konsesinya. Perusahaan ini juga aktif melalukan kegiatan pencegahan berupa deteksi dini dan peringatan dini, penyadartahuan kepada masyarakat serta patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Ditambah lagi, ketersediaan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang tersedia dengan lengkap dan sesuai standar.

Perusahaan kehutanan ini juga aktif melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar konsesi mereka dalam upaya pengendalian kebakaran hutan. Mulai dari pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA), program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) serta Program Kampung Iklim yang didanai oleh perusahaan dimaksud. *Stakeholder* lain yang memiliki peranan yang tinggi sebagai *Key player* adalah Universitas Jambi. Pihak Universitas Jambi terlibat mulai dari perencanaan dengan ikut terlibat sebagai tim ahli penyusunan Rencana Mitigasi Bencana Provinsi Jambi, ikut serta dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan berupa perbantuan Tim Reaksi Cepat pada kejadian kebakaran Hutan di Kabupaten Batang Hari oleh Mapala Siginjai, saksi ahli dalam tindak kejahatan akibat kebakaran hutan dan lahan dan juga terlibat dalam peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Context setter

*Context setter a*dalah *Stakeholder* yang memiliki pengaruh yang tinggi tetapi sedikit kepentingan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Batang Hari, beberapa *Stakeholder* yang termasuk dalam kategori ini antara lain : Balai Taman Nasional Bukit Duabelas, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batang Hari, MPA Desa Sridadi. Balai Taman Nasional Bukit Duabelas merupakan Stakeholder yang memiliki kepentingan yang sedikit tapi pengaruhnya tinggi dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Batang Hari. Balai Taman Nasional Bukit Duabelas (BTNBD) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. UPT ini mempunyai tugas pokok dan fungsi perlindungan kawasan, perlindungan keanekaragaman hayati serta merupakan tempat tinggal Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Anak Dalam serta pemanfaatan secara terbatas kawasan konservasi Taman Nasional Bukit Duabelas.

Pengaruh Balai Taman Nasional Bukit Duabelas ini tinggi dalam menjaga kelestarian keanekaragaman hayati yang terdapat di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas ini, ancaman kelestarian ini dapat berupa illegal loging, perambahan dan kebakaran hutan dan lahan. Namun kepentingannya rendah karena luasnya wilayah pengelolaan dan terbatasnya jumlah petugas serta sarana dan prasaran pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Fungsi Pengawasan terhadap pelaku usaha perkebunan baik itu monitoring dan evaluasi merupakan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batang Hari. Selain

itu, Dinas Perkebunan dan Peternakan ini harus memiliki Brigade Pengendalian Kebakaran Perkebunan dan melaksanakan penyadartahuan kepada masyarakat pekebun akan bahaya kebakaran hutan dan lahan serta peningkatan kapasitas pelaku usaha perkebunan dalam Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB).

MPA Sridadi yang merupakan masyarakat yang berada di kawasan penyangga Taman Hutan Raya Sultan Thaha Syaifudin. Masyarakat peduli api ini dibentuk dengan kepedulian yang tinggi dalam menjaga keutuhan keanekaragaman hayati yang ada di Taman Hutan Raya. Dalam upaya menjaga keutuhan kawasan Taman Hutan Raya Sultan Thaha Syaifudin ini MPA desa Sridadi ini hanya terdiri dari 15 orang anggota masyarakat yang dilengkapi dengan peralatan pemadam manual berupa gepyok, garu tajam, garu pacul serta pompa punggung.

Subject

Subject merupakan *Stakeholder* yang memiliki kepentingan yang tinggi tetapi pengaruhnya rendah dan walaupun mereka mendukung kegiatan, kapasitasnya terhadap dampak mungkin tidak ada. *Stakeholder* yang masuk dalam kategori ini antara lain : PT. Wira Karya Sakti, MPA desa Tenam, MPA desa Jebak, MPA desa Jangga Baru, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifudin Jambi, Kodim Jambi dan PT. Berkah Sawit Utama. Regu Pengendalian Kebakaran (RPK) PT. Wira Karya Sakti memiliki kepentingan yang tinggi, tim ini dilengkapi dengan personal yang tersertifikasi dan dilengkapi peralatan baik manual maupun mesin yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mereka terlibat dalam upaya pencegahan, penanggulangan, penanganan pasca kebakaran serta dukungan evakuasi dan kelematan. Dalam pemenuhan kewajiban pelaku usaha kehutanan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, PT. WKS termasuk perusahaan yang patuh dan menjalankan kewajibannya dengan baik. Namun pengaruhnya dalam penelitian ini kecil karena keterbatasan ruang lingkup kegiatan pengendalian dan terbatasnya anggaran.

MPA desa Tenam dan MPA desa Jebak mempunyai kepentingan yang tinggi dalam menjaga kelestarian keanekaragaman hayati di Taman Hutan Raya Sultan Thaha Syaifudin, namun memiliki keterbatasan dalam pemenuhan sarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan. PT. Berkah Sawit Utama memiliki pengaruh dan kepentingan yang cukup dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Perusahaan ini telah menyiapkan sarana dan prasarana dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan sesuai Peraturan Menteri Pertanian no 5 Tahun 2018, baik dari jumlah personal dan juga peralatan. Perusahaan ini berbatasan dengan areal restorasi ekosisitem Hutan Harapan di desa Bungku Kecamatan Bajubang Kab. Batang Hari dan siap membantu jika ada kejadian kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut.

Crowd

Crowd merupakan *Stakeholder* yang memiliki sedikit kepentingan dan pengaruh terhadap hasil yang diinginkan dan hal ini menjadi pertimbangan untuk mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan. Dinas Damkar dan Penyelamatan Kab. Batang Hari, Polres Batang Hari, Polsek Muara Tembesi, Koramil Muara Bulian, Yayasan Setara, MPA desa Peninjauan serta Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Batang Hari. Pada kategori *crowd* ini *Stakeholder* yang masuk adalah OPD atau satuan kerja yang tidak memiliki Tupoksi langsung dalam bidang kebakaran hutan dan lahan, seperti unsur TNI, Polri, Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Batang Hari. Terbatasnya sarana dan SDM dalam bidang Karhutla juga menjadi kendalan bagi OPD tersebut diatas. Namun stakeholder ini juga mendapatkan tanggung jawab dan juga pelibatan dalam bidang pengendalian Karhutla, seperti keterlibatan Babinsa (TNI) dan Babinkamtibmas (Polri) dalam kegiatan Patroli Terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang digagas oleh Manggala Agni.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pemadam kebakaran pada bangunan dan pemukiman, sehingga tidak secara langsung terlibat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batang Hari, namun stakeholder ini terlibat dalam mendukung kegiatan pemadaman pada lokasi-lokasi yang terbatas sumber air. Suplay air dari mobil tanki pemadam dari Dinas Damkartan ini sangat membantu dalam upaya pemadaman pada areal yang susah air. Selain itu evakuasi dan penyelamatan masyarakat didaerah kebakaran hutan dan lahan dapat dibantu oleh *Stakeholder* ini.

Yayasan Setara aktif dalam pendampingan masyarakat serta peningkatan

kapasitas masyarakat terutama di wilayah perkebunan dalam kegiatan budidaya pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hal ini tentu mendukung upaya pelestarian lingkungan dan menjaga lingkungan dari bahaya kebakaran hutan dan lahan. Desa Peninjauan merupakan salah satu desa penyangga Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) yang masyarakatnya beraktifitas dan masih melakukan pembakaran dalam pembukaan lahan. Untuk Masyarakat Peduli Api (MPA) desa Peninjauan baru dibentuk pada tahun 2020 dan mempunyai anggota sebanyak 15 orang. Pelibatan MPA desa peninjauan ini dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan berupa Patroli Terpadu, Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan Bersama MPA serta validasi lapangan titik panas (*Hotspot*).

SIMPULAN

Peranan stakeholder dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batang Hari sudah cukup baik. Terdapat 31 (tiga puluh satu) *Stakeholder* yang terlibat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batang Hari, baik dari Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten Batang Hari, Masyarakat, Pelaku Usaha Perkebunan dan Kehutanan, Lembaga Sosial Masyarakat, dan Perguruan Tinggi. Dari 31 (tiga puluh satu) *Stakeholder* tersebut terdapat 14 *Stakeholder* yang masuk dalam kategori *Keyplayer* artinya *Stakeholder* tersebut memiliki peranan yang tinggi dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, *Stakeholder* tersebut memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batang Hari. Peranan yang tinggi ini karena urusan pengendalian kebakaran hutan dan lahan merupaka tupoksi dari *Stakeholder* tersebut. Terdapat 7 (tujuh) *Stakeholder* yang mempunyai peranan sebagai *Subject*, 3 (tiga) *Stakeholder* yang mempunyai peran sebagai *Context setter* dan 7 (tujuh) *Stakeholder* yang berperan sebagai *Crowd*.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas R.2005. Mekanisme Perencanaan Partisipasi Stakeholder Taman Nasional Gunung Rinjani. *Disertasi*, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.Bogor

Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang Hari. 2022. Kabupaten Batang Hari dalam Angka 2022.

Adinugroho, W. C., I N.N. Suryadiputra, Bambang Hero Saharjo dan Labueni Siboro. 2005. *Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut*. Proyek Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia. Wetlands International – Indonesia Programme dan Wildlife Habitat Canada. Bogor. Indonesia.

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Laporan Kinerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi Tahun 2022

Laporan Statistik Balai Koservasi Sumber Daya Alam Jambi Tahun 20200

PermenKLH RI Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Permen KLH RI Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi

Permentan RI Nomor 5 tahun 2018 Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.

PP Nomor 4 tahun 2011 tentang Pengendalian Kerusakan Dan/Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Lahan,

Reeds, M.S, A. Graveso N. Dandy, H. Posthumus, K. hubacek, J. Morris, C. Prell, C.Quin. LC. Stringer. 2009. *Who's In And Why? A typology of Stakeholder Analysis Methods For Natral Resource Management. Journal of Environmental Management* 90, 1933-1949. Elsevier

SiPongi KLHK, 2020, Sipongi jadi Rujukan Utama Informasi Karhutla di Indonesia, Nomor: SP. 349/HUMAS/PP/HMS.3/8/2020, diakses melalui www.sipongi.menlhk.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Wasis, B. 2006. Dampak Kebakaran Tanah Mineral Terhadap Vegetasi dan Sifat Tanah Di Kawasan Hutan, Desa Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau. Makalah. IPB, Bogor.